



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Komentar (Hal. 11)

Jum'at, 14 Februari 2020

### APBD Lewat Perkada, ASN dan Masyarakat Gigit Jari ✓

#### Amurang, KOMENTAR

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) tinggal menunggu izin dari Gubernur Sulut untuk menetapkan APBD lewat Peraturan kepala daerah (Perkada). Menurut Sekretaris daerah (Sekda) Denny Kaawoan drafnya sudah disampaikan ke Pemprov untuk evaluasi.

"Kita sudah siap menetapkan APBD lewat Perkada dalam hal ini Perbup (Peraturan bupati). Kita sudah



□ Denny Kaawoan.

memasukkan ke Pemprov tinggal memintakan persetujuan. Selain itu juga telah dikonsultasikan ke Kemendagri. Jadi kita masih menunggu prosesnya dan semua persyaratan telah dipenuhi. Memang prosesnya akan panjang," tukas Kaawoan.

Menurutnya juga bila nanti APBD ditetapkan lewat Perkada, maka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP). PNS hanya menda-

patkan gaji tanpa tunjangan. Begitu pula dengan anggota DPRD sesuai aturan tidak mendapat gaji selama enam bulan.

"Konsekwensinya memang seperti itu sesuai UU. Tidak ada TTP bagi PNS sedangkan DPRD tidak mendapat gaji. Mau tidak mau memang kita harus siap bila Perkada yang nantinya digunakan. Makanya sudah diperintahkan agar PNS kencangkan ikat pinggang selama satu tahun," papar mantan Kaban Keuangan ini.

Masyarakat juga harus bersiap tidak ada pembangunan di Minsel selama satu tahun. Pada Perkada tidak diperkenankan belanja modal. Kecuali yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), karena telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sejumlah proyek juga dipastikan mangkrak.

"Sesuai aturan, APBD yang disahkan dengan Perkada tidak diperbolehkan belanja modal. Hanya diperbolehkan belanja rutin seperti gaji dan yang me-

nyangkut pelayanan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Memang akan ada proyek mangkrak seperti di kantor bupati. Sekali lagi itu resiko yang harus dijalani," tandas Kaawoan.

Wakil Ketua DPRD Minsel Stefanus Lumowa memperlakukan bila Pemkab dalam hal ini bupati memilih Perkada bukannya Perda. Sebab menurutnya kewenangan ada pada bupati. Walaupun sampai terjadi, 16 anggota DPRD yang tergabung di dalam koalisi pimpinan PDIP siap melakukan pengawasan.

"Silahkan saja, itu adalah pilihan dari bupati. Meski sebenarnya kami masih berharap APBD ditetapkan lewat Perda yang berarti ada pembahasan bersama eksekutif dengan DPRD. Walaupun akhirnya bupati bersikeras memilih Perkada, kami siap mengawal dan mengawasi. Kan memang tinggal cuma itu tugas legislatif," tutur ketua DPC PDIP Minsel ini. <sup>(vrs)</sup>